

## **BAB V**

### **UPAYA PENYELESAIAN KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA PADA MASA SOEHARTO DAN PENGARUHNYA DALAM MENDUKUNG STABILISASI POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (1966-1968)**

#### **5.1 Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Soeharto**

Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, telah memberikan wewenang kepada Soeharto untuk menjalankan kekuasaan eksekutif dan menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Walaupun Soekarno masih aktif menjadi Presiden, namun citranya menurun terlebih setelah peristiwa G 30 S/PKI, sementara Soeharto semakin populer dengan keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan G 30 S/PKI. Langkah-langkah pertama yang diambil oleh Soeharto sebagai pengembalian Supersemar adalah pembubaran dan pelarangan PKI bersama organisasi massanya dan penahanan terhadap 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam pemberontakan G 30 S/PKI termasuk Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri Soebandrio.

Berdasarkan Keputusan Presiden NO. 4/3/1966, tanggal 18 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS, menunjuk Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ad interim. Dalam Upacara memperkenalkan diri di depan Departemen Luar Negeri, Adam Malik menjelaskan tugas Departemen Luar

Negeri dalam Orde Baru yaitu, 'Deplu harus mengembalikan kewibawaan Pemerintah Indonesia di mata internasional setelah mengalami kerusakan-kerusakan sebagai akibat kebijaksanaan politik luar negeri di masa lalu' (Pidato Menlu Adam Malik pada upacara memperkenalkan diri tanggal 23 Maret 1966, dikutip dari Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971: 299).

Berdasarkan pidato Adam Malik tersebut, Departemen Luar negeri memiliki tugas untuk mengoreksi kebijakan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan luar negeri pada masa Demokrasi terpimpin telah mengakibatkan Indonesia semakin terisolasi dari dunia internasional. Oleh sebab itu, pada masa menteri Luar Negeri Adam Malik diambil beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pada masa Soekarno seperti menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, putusnya poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang, memulihkan kembali hubungan dengan negara-negara yang renggang akibat kebijakan politik luar negeri Orde Lama.

Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri (1971: 300), menyebutkan pedoman pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu:

- 1) kepentingan nasional yang diperhitungkan setjara realistik;
- 2) kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam dunia internasional, agar dapat digunakan untuk mentjapai tudjuan-tudjuan revolusi Indonesia dalam mentjiptakan dunia dan tata masjarakat bangsa-bangsa yang baru.

Politik luar negeri Indonesia Orde Baru tetap Bebas Aktif anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dalam segala bentuk manifestasinya setia kepada solidaritas Asia-Afrika dan Dasa Sila Bandung, juga bahwa masalah Asia

harus diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri. Hal tersebut berdasarkan pada ketetapan MPRS tahun 1966, yaitu Ketetapan MPRS No.XII tahun 1966:

- a. Bebas Aktif, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia;
- b. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat (Malik, 1978, 8-9).

Perubahan politik dalam negeri Indonesia dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, secara mendasar tidak memberi banyak perubahan dalam pola pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri tetap diabdikan pada kepentingan nasional dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soenarko, 1996: 99). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja (1983:5), bahwa:

Perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri, tidak berarti terjadi perubahan dalam landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan dan dasar-dasar dari politik luar negeri Indonesia tetap sama dan tidak boleh berubah, karena dasar-dasar yang pokok dapat dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pernyataan di atas, landasan dan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia tidak berubah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Politik luar negeri Indonesia tetap Bebas Aktif dan secara keseluruhan diabdikan pada kepentingan nasional. Perubahan yang terjadi karena adanya perubahan kepentingan nasional bangsa Indonesia, yang dititikberatkan pada pembangunan nasional. Selain itu, disebabkan oleh perubahan lingkungan internasional. Perubahan kepentingan nasional dan lingkungan internasional ini kemudian

diikuti oleh perubahan gaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam interaksinya dengan negara lain.

Pada masa Kabinet Ampera politik luar negeri Indonesia disesuaikan dengan program Kabinet Ampera yaitu stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Jangka waktu program tersebut adalah selama dua tahun yang terbagi dalam empat tahap yaitu:

- 1) tahap penjelamatan (enam bulan pertama, Djuli-Desember 1966)
- 2) tahap rehabilitasi (enam bulan kedua, Djanuari-Djuni 1967)
- 3) tahap konsolidasi(enam bulan ketiga, Djuli-Desember 1966)
- 4) tahap stabilisasi (enam bulan keempat, Djanuari-Djuni 1968) (Panitya Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri 1971: 303).

Meskipun Soeharto mulai memerintah pada tahun 1965, namun ia tidak secara penuh terlibat dalam perumusan politik luar negeri. Pada awal Orde baru, terdapat dua kelompok perumus politik luar negeri Indonesia yaitu militer dan Departemen Luar Negeri. Kelompok-kelompok militer yang terlibat dalam politik luar negeri terdiri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan HANKAM, Lembaga Pertahanan Nasional LEMHANAS dan Badan Koordinasi Intelejen Negara BAKIN (Suryadinata, 1998: 49). Selama Pemerintahan Soeharto, militer dan Departemen Luar Negeri tidak selalu mempunyai kesepakatan mengenai masalah politik luar negeri. Salah satunya adalah masalah penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, pada saat perundingan upaya normalisasi, yang akan dibahas dalam upaya normalisasi Indonesia-Malaysia.

## 5.2 Upaya Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia

### 5.2.1 Motivasi Indonesia untuk Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya perundingan untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Malaysia selalu mengalami kegagalan. Hal tersebut menjadi kendala bagi tercapainya normalisasi antara Indonesia-Malaysia. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor baik dari Indonesia maupun Malaysia. *Pertama*, sifat politik luar negeri Indonesia yang militan dan konfrontatif dalam menghadapi permasalahan dengan negara lain. *Kedua*, pihak Malaysia yang tidak mentaati Persetujuan Manila. *Ketiga*, perbedaan tafsiran mengenai gencatan senjata antara Indonesiadan Malaysia. *Keempat*, dukungan PKI yang besar terhadap kebijakan Konfrontasi.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, dengan dikeluarkannya Supersemar, membuka kembali jalan untuk mengadakan normalisasi yang sudah dirintis oleh pimpinan Angkatan Darat. Pada masa Soeharto kepentingan nasional di bidang ekonomi lebih diprioritaskan melalui program pembangunan. Berbeda dengan Soekarno yang berjuang mendapat posisi politik yang signifikan di lingkungan internasional, Soeharto memberikan penekanan pada kondisi ekonomi dan stabilitas politik domestik. Oleh sebab itu, suatu upaya untuk mencapai kepentingan nasional diperlukan adanya perubahan dalam strategi diplomasi dalam interaksi dengan negara lain.

Menurut Soenarko (1996: 101), pencapaian tujuan ekonomi dan politik jika dikaitkan dengan politik luar negeri maka tergantung pada tiga hal, yaitu:

- 1) peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasionalnya;
- 2) hubungan Indonesia dengan

aktor-aktor (*state actor* atau *non-state actor*) lain di dunia internasional, terutama pada aktor-aktor yang dapat memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia; 3) citra Indonesia di dunia Internasional.

Pada awal Orde Baru, terciptanya suatu lingkungan regional yang kondusif merupakan salah satu prioritas Indonesia. Indonesia membutuhkan adanya lingkungan yang relatif stabil di sekelilingnya yang dapat membuat Indonesia berkonsentrasi penuh pada pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui memperbaiki citra Indonesia di lingkungan Asia Tenggara yang cenderung dipandang sebagai negara yang berhaluan kiri yang radikal (Soenarko, 1996: 101). Untuk menciptakan suatu lingkungan regional yang kondusif, diperlukan pula adanya kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut terwujud dalam bentuk ASEAN. Untuk mempererat kerjasama regional dalam bentuk ASEAN, maka pertikaian-pertikaian di Asia Tenggara khususnya pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia.

Selain itu, interaksi dengan aktor-aktor lain dalam sistem internasional perlu diadakan, yaitu dengan menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional. Masalah dalam interaksi ini adalah masalah bantuan luar negeri yang dibutuhkan untuk menyangga pertumbuhan ekonomi. Namun, masalah ini di sisi lain merupakan sikap ketergantungan terhadap negara lain.

Untuk mencapai suatu lingkungan yang kondusif di Asia Tenggara serta memperoleh bantuan luar negeri, perlu diambil beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pada masa Orde Lama. Indonesia mulai mendekati Barat untuk memperoleh bantuan dan meninggalkan politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kebijakan konfrontasi mengakibatkan kemerosotan ekonomi,

yang berdampak pada semakin besarnya penderitaan bagi rakyat. Oleh sebab itu, meneruskan konfrontasi berarti menambah penderitaan rakyat.

Kepentingan nasional yang berprioritas pada ekonomi dalam menunjang pembangunan, menjadi dasar untuk memperbaiki politik luar negeri Indonesia. Sebab, politik luar negeri pada dasarnya diabdikan untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Soekarno ditinggalkan. Politik konfrontasi diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, motivasi Indonesia segera mengakhiri konfrontasi adalah adanya kepentingan nasional yaitu pembangunan. Untuk menunjang kepentingan nasional maka suatu lingkungan regional yang kondusif dan bantuan ekonomi dari negara lain diperlukan oleh Indonesia. Selain itu, untuk mewujudkan suatu kerjasama regional yakni dalam wadah ASEAN maka konfrontasi Indonesia-Malaysia harus dihentikan.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia dapat diakhiri dalam waktu yang relatif pendek. Mukmin (1991: 107-108) mengemukakan tiga faktor yang mendorong penyelesaian konfrontasi Indonesia Malaysia yaitu:

*Pertama*, faktor internal Federasi sendiri yakni adanya kelemahan struktural pemerintahan Federasi, yang mengakibatkan timbulnya disintergrasi ke dalam. *Kedua*, faktor internal di Indonesia, yang ditimbulkan oleh kegagalan pemberontakan G.30.S/PKI dan kemudian mengakibatkan pergantian pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. *Ketiga*, faktor bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yakni adanya keinginan yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konfrontasi secara langsung tanpa pihak ketiga.

Selain adanya motivasi dari Indonesia untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, setelah terjadinya pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Kelemahan struktural yang menyebabkan disintegrasi dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang bersifat rasial yakni Malaysia cenderung masih menonjolkan ras Melayu, sementara Singapura lebih multirasial. Hal tersebut juga mengaibatkan keluarnya Singapura dari Federasi pada bulan Agustus 1965. Kuala Lumpur khawatir Singapura lebih cepat berakomodasi dengan Indonesia (Mukmin, 1991: 110), oleh sebab itu, Kuala Lumpur ingin mempercepat proses normalisasi dengan Indonesia.

Faktor kedua yaitu terjadinya kegagalan pemberontakan G 30 S/PKI, sehingga terjadi peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke tangan Soekarno, walaupun Soekarno masih aktif sebagai Presiden. Peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto yang mengakibatkan perubahan kepentingan nasional, memiliki pengaruh bagi tercapainya penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sebab seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada masa kepemimpinan Soeharto masalah ekonomi yaitu pembangunan nasional menjadi prioritas utama, untuk itu kondisi politik dalam negeri dan stabilitas regional sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, berhasilnya Indonesia menciptakan lingkungan regional yang stabil ditentukan oleh gaya diplomasi *low profile* (Soenarko, 1996: 102). Hal ini, berbeda pada masa kepemimpinan Soekarno yang *high profile* ingin menunjukkan kekuatan Indonesia secara radikal dan tanpa kompromi.



Adanya keinginan antara Indonesia dan Malaysia untuk mengakhiri konfrontasi, semakin mempercepat proses normalisasi. Beberapa kalangan di Malaysia seperti di kalangan pejabat Kementerian Luar Negeri dan kalangan intelejen Malaysia sadar bahwa sikap permusuhan antara Indonesia Malaysia tidak bisa diteruskan. Di pihak Indonesia kesadaran tersebut juga datang dari kalangan militer yakni TNI AD (Mukmin (1991: 112). Oleh sebab itu, proses normalisasi pun diupayakan secepatnya. Selain TNI AD, pada perkembangannya Departemen Luar Negeri (Adam Malik) dilibatkan dalam upaya normalisasi antara Indonesia-Malaysia.

### **5.2.2 Proses Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia**

Proses normalisasi pada mulanya merupakan upaya rintisan rujuk melalui operasi khusus (dari AD khususnya Operasi Khusus dan KOTI). Setelah lahirnya Supersemar proses normalisasi diangkat ke permukaan percaturan politik menjadi lebih terbuka. Pada saat itu Departemen Luar Negeri dan Adam Malik mulai dilibatkan (Sulistiyo, 1991: 93-94). Proses normalisasi Indonesia-Malaysia pada masa Soeharto masih melibatkan pihak asing, seperti Jepang. Jepang yang dari awal konfrontasi berperan dalam beberapa perundingan, pada bulan Mei 1966 menawarkan kembali untuk menjadi penengah dalam masalah Malaysia (Nishihara, 1976: 90).

Pihak Malaysia melihat bahwa peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto membuka jalan dalam penyelesaian konfrontasi. Pada bulan Maret 1966, Soeharto mengumumkan bahwa Indonesia telah “membuka pintu” bagi penyelesaian

dengan cara-cara damai dengan Malaysia. Indonesia ikut pula dalam Konferensi Menteri-menteri Asia Tenggara mengenai pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh Jepang pada tanggal 6 sampai 7 April 1966 (Nishihara, 1976: 91). Keikutsertaan Indonesia merupakan tanda kesediaan untuk melakukan penyelesaian konfrontasi. Namun, pada tanggal 16 April Duta Besar Indonesia untuk Jepang Rukmito Hendraningrat, mengumumkan bahwa meskipun Indonesia telah “membuka pintu” namun pada prinsipnya konfrontasi terhadap Malaysia tidak berubah. Hal inilah yang menjadi penghambat usaha penyelesaian, karena Malaysia merasa curiga dengan pihak Indonesia.

Proses normalisasi Indonesia-Malaysia masih melibatkan Jepang, hal ini, terbukti ketika Adam Malik meminta bantuan kepada Shirahata, Konsul Jepang di Surabaya untuk membujuk Malaysia bertemu dengan pihak Indonesia yaitu Adam Malik. Pada tanggal 29 April 1966, Tunku Abdul Rahman dan Adam Malik mengadakan pembicaraan secara rahasia di Bangkok. Hal tersebut diungkapkan oleh Tun Abdul Razak bahwa Indonesia benar-benar ingin berdamai dengan Malaysia (Nishihara, 1976: 93). Pembicaraan rahasia tersebut diadakan, ketika Adam Malik akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina Narsisco Ramos, yang diadakan pada tanggal 30 April 1966. Pertemuan ini diadakan dalam rangka membuka hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara.

Upaya penyelesaian sengketa dilakukan atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Adam Malik dan Narsisco Ramos meminta bantuan Thanat Khoman untuk mengadakan pertemuan di Bangkok antara pihak-pihak

yang bersengketa. Thanat Khoman kemudian pergi ke Kuala Lumpur pada tanggal 3 Mei 1966 untuk berunding dengan Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak (Berita Yudha, 4 Mei 1966). Kepergian Thanat Khoman ke Malaysia, berhasil meyakinkan pihak Malaysia untuk berunding kembali dengan Indonesia yang akan diselenggarakan di Bangkok.

Pada tanggal 20 Mei 1966, Kogam mengirimkan delegasi ke Kuala Lumpur yang bersifat misi muhibah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Pengiriman delegasi ini bukan perintah Menteri Luar Negeri, melainkan atas perintah Soeharto selaku Kepala Staf Kogam dan pengemban Supersemar (Mukmin, 1991: 132). Hal ini, menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konfrontasi bukan hanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, melainkan juga pihak militer. Sebab delegasi ini terdiri dari 20 puluh orang militer, yang bertugas untuk bertemu dengan Tun Abdul Razak dan Tunku Abdul Rahman dalam rangka persiapan perundingan di Bangkok.

Perundingan Bangkok, merupakan perundingan formal tingkat pertama para pejabat Indonesia dan Malaysia, untuk membicarakan prinsip-prinsip normalisasi. Perundingan diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Kedua Menteri Luar Negeri setuju bahwa hubungan langsung dan berkelanjutan antara kedua pemerintahan akan terpelihara (Boyce, 1968: 107).

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk tidak membicarakan terlebih dahulu mengenai status Sabah dan Serawak sebagai prasyarat normalisasi

hubungan Indonesia dengan Malaysia. Sebelum terjadi kesepakatan, antara pihak Indonesia dan Malaysia timbul perbedaan mengenai penentuan status Sabah dan Serawak, apakah ditentukan melalui pemilihan umum atau referendum. Selain itu, masalah pengakuan Federasi Malaysia apakah secara otomatis atau tidak (Mukmin, 1991: 135-136).

Adam Malik memiliki keinginan untuk segera mengakhiri masalah dengan Malaysia secepat mungkin. Adam Malik beranggapan bahwa masalah-masalah yang sifatnya mendasar tidak perlu dibicarakan terlebih dahulu di Bangkok, karena dapat mengganggu perundingan. Tindakan Adam Malik untuk tidak membicarakan masalah Sabah dan Serawak, mendapat tentangan dari delegasi militer. Militer berpendapat bahwa masalah Sabah dan Serawak hendaknya dibicarakan dalam perundingan untuk mendapatkan kejelasan dari pihak Malaysia. Pihak militer menginginkan supaya pengakuan terhadap Malaysia dilakukan sesudah pemilihan umum bukan sebelumnya.

Selain kekecewaan dari pihak militer, tindakan Adam Malik juga menimbulkan kemarahan dari Soekarno yang menganggap Adam Malik sebagai pribadi yang mudah menyerah terhadap musuh. Sebab, Soekarno pada dasarnya masih memegang prinsip bahwa penyelesaian konfrontasi harus berdasarkan Perjanjian Manila. Tugas Adam Malik untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia akhirnya dilaihnkan kepada Soeharto, dan diserahkan kembali kepada Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menjelang penandatanganan Persetujuan Jakarta. Soekarno menambahkan (*annex*) dalam perjanjian Bangkok yang menghendaki agar Sabah dan Serawak melakukan pemilihan umum untuk

mengetahui keinginan penduduk setempat sebelum mengakui Malaysia (Mukmin, 1991: 137 dan Weinstein dalam Suryadinata, 1998: 57).

Konferensi Bangkok walaupun masih mengandung beberapa masalah, namun telah dijadikan landasan bagi adanya persetujuan normalisasi hubungan. Sebagai ketua delegasi Malaysia Tun Abdul Razak menyatakan bahwa telah 'meletakkan landasan perdamaian' (Mackie, 1974: 77). Walaupun di Indonesia hasil Konferensi Bangkok menjadi masalah, setelah Adam Malik bertindak menyetujui pengakuan Malaysia sebelum diadakan pemilihan umum.

Untuk menjaga supaya tidak terjadi "perang tafsir", setelah tugas penanganan masalah Malaysia diberikan kepada Soeharto, maka diadakan kontak-kontak dengan Kuala Lumpur. Hal tersebut sesuai dengan keputusan sidang Kogam pada tanggal 8 Juni 1966, untuk terus mengadakan kontak dengan Kuala Lumpur (Berita Yudha, 11 Djuli 1966). Adanya pergantian tugas dari Adam Malik kepada Soeharto dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan dari pihak Malaysia bahwa Indonesia masih ragu untuk mengakhiri konfrontasi. Selain itu, dikhawatirkan pula dapat menyulitkan kembali proses normalisasi. Sehingga kontak dengan Malaysia harus tetap terjaga, supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Hubungan Indonesia-Malaysia pada bulan Juli sudah menunjukkan adanya suatu kemajuan untuk mengadakan rujuk. Seperti yang dikemukakan Ali Murtopo bahwa "normalisasi hubungan dengan Malaysia dan Singapura hanya tinggal masalah teknis saja" (Berita Yudha, 16 Djuli 1966). Proses normalisasi Indonesia-Malaysia tinggal menunggu waktu saja, sebab Indonesia maupun Malaysia sudah menunjukkan adanya jalan menuju normalisasi. Proses

normalisasi dipercepat setelah berhasil terbentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Soeharto selaku ketua Presidium menyatakan bahwa “konfrontasi akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi” (Berita Yudha, 28 Djuli 1966). Setelah Kabinet Ampera terbentuk, penyelesaian konfrontasi menjadi agenda utama bagi Indonesia.

Sikap optimis yang ditunjukkan oleh Soeharto karena adanya keinginan yang besar dari pihak Indonesia dan Malaysia untuk segera mengakhiri konfrontasi. Oleh sebab itu, Soeharto yakin bahwa upaya normalisasi dapat segera dilakukan. Selain itu, dengan terbentuknya Kabinet Ampera yang mempunyai tugas pokok Stabilisasi politik dan ekonomi, upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia menjadi suatu agenda yang harus segera dilaksanakan.

Masalah Malaysia diupayakan sudah dapat diselesaikan sebelum tanggal 17 Agustus 1966, hal ini seperti yang dikemukakan pada sidang Kabinet Ampera (Berita Yudha, 4 Agustus 1966). Sementara perjanjian perdamaian dengan Malaysia diupayakan dapat ditandatangani pada akhir Agustus (Berita Yudha, 9 Agustus 1966). Seperti yang direncanakan, normalisasi Indonesia dan Malaysia dapat terwujud pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta antara Adam Malik dengan Tun Abdul Razak. Persetujuan normalisasi atau yang disebut *Jakarta Accord* antara lain menyatakan bahwa:

Pasal 1, Pemerintah Malaysia, untuk menyelesaikan persoalan2 antara kedua negara jang timbul karena dibentuknja Malaysia, menjetudjujui untuk memberikan kesempatan kepada rakjat Sabah dan Serawak, jang langsung berkepentingan, menegaskan lagi, setcepat mungkin, setjara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan jang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. Pasal 2, Pemerintah Republik Indonesia, dalam keinginannya jang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerjasama dan persahabatan jang erat antara Indonesia dan

Malaysia, menyetujui dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan, dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik setcepat mungkin (Berita Yudha, 12 Agustus 1966: 1-2).

Persetujuan normalisasi mengandung adanya saling pengertian antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia mengabulkan syarat Indonesia yaitu mengadakan pemilihan umum untuk menegaskan kembali keinginan rakyat Sabah dan Serawak. Pemerintah Indonesia, bersedia mengakui dan menerima Malaysia serta mengadakan kerjasama. Sementara hubungan diplomatik Indonesia tidak segera pulih, namun kantor-kantor diplomatik tidak resmi di kedua negara telah dibuka. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia sepenuhnya dapat dipulihkan pada bulan Agustus 1967, setelah pemilihan umum di Sabah dan Serawak.

Dengan Persetujuan Normalisasi ini berarti politik konfrontasi telah berakhir dan hubungan Jakarta-Kuala Lumpur normal kembali. Seperti yang dimuat dalam Berita Yudha (12 Agustus 1966), bahwa “konfrontasi Indonesia yang sudah berlangsung selama tiga tahun otomatis dihentikan dan terbuka hubungan persahabatan antara kedua negara bersaudara dan serumpun”.

Sesuai dengan pernyataan Yusuf (1989: 122) bahwa “diplomasi dalam adanya ketegangan dua negara hanya sebatas pada penyerahan ultimatum belaka. Begitu tindakan permusuhan bermula, masalah diambil alih oleh militer”. Pada masa konfrontasi, ketika diplomasi mengalami kegagalan, maka militer mengambil alih dengan melakukan tekanan. Yusuf (1989: 122) juga mengemukakan bahwa diplomasi dapat dimulai kembali setelah konflik atau perang berhasil diselesaikan. Begitu pula setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia

terselesaikan maka hubungan diplomatik antara kedua segera diperbaiki, setelah terjadi ketegangan selama tiga tahun.

### **5.3 Pengaruh Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam Mendukung Stabilisasi Politik dan Ekonomi Indonesia**

Kebijakan politik yang diambil selama kepemimpinan Soekarno, mengakibatkan ketidakstabilan politik, yang berdampak pula bagi perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan yang menyebabkan ketidakstabilan politik adalah kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia. Dampak dari konfrontasi Indonesia Malaysia sangat kompleks yaitu terhadap kehidupan politik dan ekonomi Indonesia serta terhadap hubungan luar negeri Indonesia.

Keseimbangan politik antara tiga kekuatan politik di Indonesia yaitu Soekarno, militer dan PKI semakin goyah. Posisi PKI semakin kuat dan menjadi penggerak utama dalam politik konfrontasi Soekarno. Sehingga dukungan Soekarno semakin besar terhadap PKI, terutama setelah hubungan Indonesia dengan RRC semakin dekat.

Peristiwa kegagalan percobaan kudeta pada tanggal 30 September 1965, telah berakibat berakhirnya perimbangan kekuatan-kekuatan yang saling bermusuhan yang mendukung Demokrasi Terpimpin (Ricklefs, 1998: 430). Salah satu kekuatan politik di Indonesia yaitu PKI, yang dianggap sebagai dalang di balik percobaan kudeta berhasil ditumpas. Selain itu, peristiwa tersebut telah menjatuhkan kekuasaan Soekarno, sehingga kekuatan politik di Indonesia tinggal militer. Peran militer dalam menumpas G 30 S/PKI dan pembersihan dalam tubuh



militer, telah menempatkan militer sebagai pemegang peranan yang dominan dalam politik baru yang disebut Orde Baru (Alfian, 1992: 46). Peran militer dalam politik Orde Baru direpresentasikan oleh Jenderal Soeharto sebagai pengambil keputusan yang paling penting, baik dalam politik dalam negeri maupun politik luar negeri (Suryadinata, 1998: 44).

Usaha untuk merintis stabilisasi politik berlangsung setelah dikeluarkannya Supersemar. Supersemar dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketengan serta kestabilan jalannya revolusi (Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1993: 416). Salah satu keberhasilan tindakan yang diambil Soeharto adalah dengan terbentuknya Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Soeharto menjadi ketua Presidium yang melaksanakan kepemimpinan pemerintahan sehari-hari. Stabilisasi politik dan ekonomi atau disebut Dwi Dharma menjadi tugas pokok Kabinet Ampera, dengan program:

- a) memperbaiki perikehidupan rakyat terutama sandang pangan
  - b) melaksanakan pemilihan umum;
  - c) melaksanakan suatu politik luar negeri yang bebas aktif;
  - d) meneruskan perjuangan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
- (Panitya Penulisan Sedjarah DEPLU Negeri, 1971: 300).

Tugas pokok Kabinet Ampera, dimaksudkan untuk dapat menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang lebih stabil. Sebab, pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa tersebut. Tingkat inflasi Indonesia semakin tinggi, begitu pula hutang-hutang luar negeri. Sementara

Indonesia semakin terisolasi dari dunia internasional, yang diakibatkan kebijakan luar negeri yang diambil selama kepemimpinan Soekarno.

Berdasarkan tugas pokok dan program Kabinet Ampera, maka sasaran-sasaran utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kelanjutan penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dihasilkan MPR dan pemerintah yang stabil, kuat dan berwibawa yang mampu melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang
2. Menciptakan stabilitas ekonomi, dimana terdapat tingkat harga yang stabil dan serasi dengan daya beli rakyat, yang berarti perbaikan kesedjahteraan rakyat dan sekaligus merupakan kondisi sosial ekonomi untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan ekonomi setjara besar-besaran (Panitya Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971: 301).

Stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia dilakukan dalam jangka waktu dua tahun yang dibagi dalam empat tahap yaitu tahap penyelamatan (bulan Juli-Desember 1966), tahap rehabilitasi (Januari-Juni 1967), tahap konsolidasi (Juli-Desember 1967) dan tahap stabilisasi (Januari-Juni 1968). Dalam rangka pelaksanaan strategi tahap penyelamatan serta berdasarkan inventarisasi dan evaluasi yang mendalam disusunlah pola kebijakan dalam bidang rehabilitasi dan stabilisasi politik serta rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi.

Pola kebijakan rehabilitasi dan stabilisasi politik pada dasarnya adalah pengamanan secara murni Pancasila, UUD 1945 dan pelaksanaan keseluruhan jiwa, semangat dan Ketetapan Sidang ke-IV MPRS. Dalam bidang politik luar negeri Indonesia kembali kepada politik luar negeri Bebas Aktif serta anti-kolonialisme dengan merintis hubungan baik dengan negara-negara asing, dan mengakhiri isolasi dari pergaulan kehidupan internasional.

Sesuai dengan program Kabinet Ampera, Departemen Luar Negeri menyusun Rencana Kerja sebagai berikut:

- a) Politik luar negeri dalam arti seluas-luasnja, dirumuskan oleh Pemerintah/Kabinet, sedang pelaksanaannja diserahkan kepada kebijakan Menteri Luar Negeri
- b) Sistematis pengaturannja diselaraskan dengan Strategi Dasar Kabinet yang menggariskan pelaksanaan programnja melalui pembabakan tahap demi tahap (Panitya Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971: 303).

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada dasarnya disesuaikan dengan tugas pokok dan program Kabinet Ampera yang dibagi dalam empat tahap yaitu tahap penyelamatan, tahap rehabilitasi, tahap konsolidasi dan tahap stabilisasi. Sebab, pada masa Demokrasi Terpimpin, politik dan ekonomi Indonesia sangat tidak stabil sebagai dampak dari kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia pada masa Soekarno. Maka, politik luar negeri yang dijalankan harus mengacu pada program Kabinet Ampera untuk menciptakan kestabilan politik dan ekonomi Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan program Kabinet Ampera, kebijakan luar negeri yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian, situasi yang tidak mendukung pelaksanaan pemilihan umum, kebijakan politik luar negeri yang bertentangan dengan prinsip Bebas Aktif harus ditinggalkan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi agenda utama dalam pencapaian stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia.

Program pertama Kabinet Ampera adalah memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan. Dengan demikian kebijakan diprioritaskan pada ekonomi, sebab perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan pada masa tersebut. Salah satunya adalah kebijakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kehidupan rakyat Indonesia menjadi terpuruk dengan memburuknya perekonomian Indonesia. Pada awal dikeluarkannya kebijakan konfrontasi, Indonesia harus kehilangan rencana bantuan untuk rehabilitasi ekonomi dari Amerika Serikat dan IMF pada tahun 1963.

Perekonomian Indonesia semakin terpuruk selama masa konfrontasi, dengan meningkatnya laju inflasi. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650 % setahun (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 430). Pemerintahan Soekarno juga telah mewariskan hutang-hutang kepada luar negeri yang mencapai 2,3 milyar dolar AS, dan harus dibayar pada tahun 1967, ditambah pula dengan tunggakan-tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 500 juta dolar AS (Widjojo Nitisastro dalam Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 431). Oleh sebab itu, Indonesia harus segera melakukan pengendalian inflasi supaya harga tidak terus melonjak naik. Begitu pula hutang-hutang-hutang luar negeri yang tidak mungkin segera dibayar, harus dapat ditangguhkan. Indonesipun harus memperoleh bantuan luar negeri untuk membantu stabilisasi ekonomi.

Penyelesaian konfrontasi sebagai agenda politik luar negeri Indonesia memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat

dan Jepang mulai merencanakan akan memberikan bantuan kepada Indonesia, dengan catatan Indonesia bersedia mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia. Jepang bahkan memberikan syarat pemberian pinjamannya kepada Indonesia yaitu harus segera mengakhiri konfrontasi dan kembali ke PBB secepat mungkin (Nishihara, 1976: 94). Amerika Serikat telah memperlihatkan niatnya untuk memberikan bantuan kepada Indonesia dari akhir tahun 1964 dengan memberikan bantuan obat-obatan dalam jumlah kecil kepada Angkatan Darat untuk dijual di pasar terbuka. Pada bulan April 1966, Washington memberikan pinjaman untuk pembelian beras dan benang secara darurat. Bantuan ekonomi secara simbolik juga diberikan oleh Australia, Jepang dan Inggris (Leifer, 1989: 168).

Penandatanganan Persetujuan Bangkok pada tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 1966, membawa dampak yang positif bagi Indonesia. Jepang menyarankan diadakannya suatu Konferensi Internasional untuk membentuk bantuan kepada Indonesia. Pada bulan Juli 1966 Adam Malik mengadakan pembicaraan dengan ketua Tim Teknis IMF U Tun Tin sekitar kemungkinan kembali menjadi anggota IMF (Berita Yudha, 6 Djuli 1966). Secara resmi Indonesia kembali menjadi anggota IMF pada tanggal 30 Setember 1966.

Mengenai masalah kredit luar negeri, dinyatakan bahwa sudah banyak negara yang menyanggupi memberikan kredit kepada Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman Barat dan Belanda. Sedang Inggris menyanggupi bantuan bebas bukan kredit sebanyak 1 Juta Poundsterling (Berita Yudha, 28 Djuli 1963). Selain memperoleh bantuan asing, Indonesia juga berhasil menjadwalkan kembali pembayaran hutang-hutang luar negeri. Pembicaraan

penundaan jadwal pembayaran hutang-hutang yang seharusnya dibayar Indonesia pada tahun 1968 mulai dibicarakan pada tahun 1966 di Tokyo, kemudian di Paris pada tahun 1967 yang berhasil menyetujui penangguhan pembayaran hutang Indonesia secara multilateral (Sabir, 1987: 202). Perundingan Tokyo dan Paris, telah dicapai persetujuan untuk melakukan penundaan pembayaran hutang-hutang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 dapat ditunda hingga tahun 1972-1978.

Perundingan antara negara maju untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta syarat lunak diadakan di Amsterdam pada bulan Februari 1967. Pertemuan di Amsterdam tersebut menghasilkan pembentukan sebuah badan yaitu *Inter-Governmental Group for Indonesia* (IGGI). Selain itu, diperoleh kesepakatan memperoleh bantuan luar negeri serta mengadakan penangguhan hutang-hutang dan peringanan syarat-syarat pembayaran kemabali hutang-hutang peninggalan Orde Lama (Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1993: 439).

Bantuan kredit yang diperoleh Indonesia dari negara-negara anggota IGGI pada tahun 1967 sebesar 210 juta dolar AS dan pada tahun 1968 sebesar 325 juta dolar AS (Panitya Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971: 316). Bantuan kredit dan penjadwalan hutang-hutang Indonesia, dapat membantu Indonesia dalam menanggulangi inflasi yang menyebabkan perekonomian rakyat menjadi terpuruk. Pemberian kredit dan penundaan hutang-hutang dilakukan pula dengan negara sosialis seperti Yugoslavia, Bulgaria, Hongaria, Cekoslowakia dan Rumania secara bilateral pada tahun 1966, 1967 dan 1968 (Panitya Penulisan

Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971: 315). Adanya bantuan modal asing dari negara Barat dan sosialis, merupakan salah satu wujud dari politik luar negeri Bebas Aktif (Madylao, 1982: 52-53). Karena tidak menerima bantuan dari salah satu kubu atau blok.

Selain bantuan kredit dan penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, penanaman modal asing pun mulai masuk ke Indonesia yang dapat mendukung upaya rehabilitai ekonomi Indonesia. Pada tahun 1967, Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang penanaman modal asing, yang kemudian disusul oleh peraturan mengenai penenaman moal asing. Pemerintah Indonesia memberikan kelonggran-kelonggaran dan fasilitas bagi penanam modal, sehingga jumlah modal asing yang akan ditanamkan di Indonesia semakin bertambah (Panitya Penulisan Sedjarah Depertemen Luar Negeri, 1971: 317).

Program Kabinet Ampera lainnya adalah melaksanakan pemilihan umum, melaksanakan suatu politik luar negeri yang bebas aktif, meneruskan perjuangan anti imperialisme dalam segala bentuk dan menifestasinya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya telah menciptakan ketidaksatabilan politik Indonesia. Lahirnya Persetujuan Jakarta sebagai persetujuan penyelesaian konfrontasi Indonesia, maka Indonesia dapat menciptakan stabilisasi politik yang menjadi salah satu tugas pokok Kabinet Ampera. Seperti yang dikemukakan Soeharto "Kita harus dapat mentjiptakan stabilisasi politik jang mantep dengan lahirnja persetudjuan Djakarta..." (Berita Yudha, 18 Agustus 1966). Pada tanggal 31 Agustus secara resmi hubungan

diplomasi antara Indonesia-Malaysia dibuka kembali pada tingkat Kedutaan Besar.

Stabilisasi politik dapat mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada tahun 1968. Dengan demikian, kebijakan konfrontasi Indonesia-Malaysia harus diakhiri karena konfrontasi berdampak terhadap ketidakstabilan politik. Kebijakan konfrontasi juga merupakan bentuk penyelewengan terhadap politik luar negeri Bebas Aktif. Hal itu dikarenakan, politik luar negeri yang lebih condong terhadap blok Komunis (RRC).

Kedekatan Indonesia dengan RRC semakin jelas ketika Indonesia keluar dari PBB, sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, dengan bantuan RRC Indonesia mendirikan Conefo untuk menandingi PBB. Keberpihakan terhadap blok Komunis terwujud dalam pembentukan poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Berakhirnya konfrontasi berarti putusnya poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Pada tanggal 30 Oktober 1967, hubungan Indonesia dengan RRC dibekukan, dan KBRI di Peking ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 476).

Kebijakan konfrontasi juga berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara luar. Indonesia semakin terisolasi dari negara-negara Barat sebagai dampak dari doktrin yang membagi dunia dalam dua kubu yang bertentangan yaitu Nefos dan Oldefos. Selain hubungan yang renggang dengan negara-negara Barat, hubungan negara-negara Asia-Afrika, Eropa dan negara-negara Sosialis Eropa juga renggang. Untuk itu, dalam pelaksanaan politik luar



negeri dalam tahap penyelamatan terdapat dua unsur pokok yang harus dilaksanakan yaitu pendobrakan keadaan isolasi sebagai akibat kebijakan politik luar negeri Orde Lama dan eksplorasi dan persiapan ke arah normalisasi hubungan Indonesia dengan dunia luar termasuk masuk kembali dalam keanggotaan PBB.

Penyelesaian konfrontasi Indonesia dengan Malaysia telah memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hubungan yang renggang dengan negara-negara Barat mulai diperbaiki, begitu pula dengan Uni Soviet dan negara-negara Sosialis mulai diarahkan untuk mencapai pengertian yang baik setelah putusnya poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Indonesia berhasil memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat, begitu pula dengan negara-negara sosialis dan pada tanggal 28 September 1966, Indonesia aktif kembali di PBB.

Kebijakan baru dalam politik luar negeri Indonesia setelah terjadinya peralihan kepemimpinan, pada satu sisi berhasil memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat. Hubungan dengan Malaysia juga dapat kembali normal dengan lahirnya Persetujuan Jakarta. Namun, di sisi lain hubungan dengan RRC semakin renggang, terlebih adanya anggapan keterlibatan RRC dalam upaya kudeta tanggal 30 September 1965. Hubungan diplomatik Indonesia-RRC dibekukan pada tanggal 30 Oktober 1967.

Kerjasama Regional menjadi salah satu sasaran dalam program stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mewujudkan terbentuknya suatu kerjasama regional dalam wadah *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, maka persengketaan diantara

negara-negara di Asia Tenggara harus diakhiri. Maka dari itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia harus diakhiri untuk mewujudkan terbentuknya kerjasama regional. Pemulihan hubungan Indonesia Malaysia merupakan prakondisi terbentuknya ASEAN (Sulistiyo, 1991: 97). Menurut Supardan (1983: 98), berakhirnya konfrontasi merupakan situasi yang memungkinkan diadakannya pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN dapat terwujud pada bulan 8 Agustus 1967, dengan beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina.

Hasil yang dicapai selama Kabinet Ampera dalam memulihkan kembali hubungan Indonesia-Malaysia, berdampak positif bagi Indonesia. Stabilisasi politik dan ekonomi yang merupakan tugas pokok kabinet Ampera dapat dilaksanakan. Indonesia telah berhasil memperbaiki hubungan dengan Barat, begitu pula dengan negara-negara sosialis, yang sempat renggang pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Membaiknya hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut, membuka kembali pemberian bantuan modal asing serta penundaan pemabayaran hutang-hutang luar negeri.

Tindakan yang telah berhasil dilaksanakan pada masa Kabinet Ampera untuk menarik kepercayaan dan bantuan luar negeri dalam usaha pembangunan adalah aktif kembali dalam organisasi internasional seperti PBB dan badan-badan internasional lainnya. Selain itu, berhasil mengadakan pembicaraan dengan negara-negara kreditor luar negeri mengenai *rescheduling* hutang-hutang dan menarik penanam modal asing ke Indonesia. Panitia Penulisan Sedjarah

Departemen Luar Negeri (1971: 313) mengemukakan pula bahwa tindakan yang berhasil dilaksanakan selama Kabinet Ampera yaitu:

Mengembalikan perusahaan-perusahaan asing yang pada zaman Orde Lama telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Mengusahakan bantuan-bantuan keuangan luar negeri yang baru untuk mempertajam pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih mengintensifikan perdagangannya dengan luar negeri.

Keberhasilan diakhirinya konfrontasi memiliki pengaruh dalam mendukung stabilisasi ekonomi Indonesia yang sasaran utamanya adalah pengendalian laju inflasi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Keberhasilan program stabilisasi ekonomi dapat terlihat dari menurunnya tingkat inflasi. Pada tahun 1967 tingkat inflasi turun menjadi 100 persen dan pada tahun 1968, menjadi 85 persen. Penurunan yang luar biasa terjadi pada tahun 1969 yaitu turun ke tingkat 10 persen (Ricklefs, 1998: 436).

Selain dapat mengendalikan laju inflasi, bantuan pinjaman dan penjadwalan kembali hutang-hutang luar negeri dapat diperoleh Indonesia baik dari negara Barat maupun negara-negara sosialis. Soenarko (1996: 101) menyatakan bahwa “pencapaian stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi bersifat timbal balik, dalam arti pencapaian stabilitas politik merupakan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya”. Stabilisasi yang dicapai Indonesia dapat mendukung stabilisasi politik yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum yang pada mulanya akan diadakan pada tahun 1968, dan dapat terselenggara pada tahun 1971. Tercapainya stabilisasi politik dan ekonomi merupakan pendukung bagi terlaksananya pembangunan nasional.